

**STRATEGI BADAN KEUANGAN DAN ASET
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Jonathan Miguel Timbowo

NPP. 32.0825

Asdaf Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0825@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA., CRGP.,

QGIA., CFA., CGCAE

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The preparation of Local Government Financial Statements (LKPD) is a strategic obligation reflecting the accountability of regional financial management. Although the Government of Minahasa Selatan Regency has successfully maintained an Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board of Indonesia (BPK) for eight consecutive years, studies specifically examining the strategies of the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) using a qualitative approach remain limited, particularly in exploring internal organizational dynamics. **Purpose:** This study aims to analyze the strategies implemented by BKAD Minahasa Selatan in preparing LKPD and to identify supporting and inhibiting factors that influence the financial reporting process. **Method:** The research uses a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, framed by the Strategic Management theory of Novianto (2019). **Result:** BKAD's strategy focuses on strengthening internal coordination, improving human resource competencies, utilizing financial information systems, and following up on audit recommendations. The main obstacles include delays in report submissions by OPDs, limited technical competencies, and frequent staff rotations that disrupt continuity. **Conclusion:** Improvement efforts include technical training, enhancement of digital infrastructure, asset data updates, and intensive inter-agency coordination. Strong leadership commitment is also key to sustaining report quality.*

Keywords: *Strategy, Local Government Financial Statements, BKAD, Unqualified Opinion, Strategic Management*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan kewajiban strategis yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Minahasa Selatan telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan tahun berturut-turut dari BPK, namun studi*

mengenai strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam mencapai capaian tersebut masih terbatas, khususnya dengan pendekatan kualitatif yang mengungkap aspek internal organisasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi BKAD Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun LKPD serta mengevaluasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses pelaporan keuangan daerah. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan pendekatan teori Manajemen Strategi Novianto (2019). **Hasil/Temuan:** Strategi penyusunan LKPD oleh BKAD difokuskan pada penguatan koordinasi internal, peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan sistem informasi keuangan, serta tindak lanjut hasil audit. Hambatan utama meliputi keterlambatan pelaporan dari OPD, keterbatasan kompetensi teknis, dan rotasi pegawai yang berdampak pada kontinuitas pelaporan. **Kesimpulan:** Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan, peningkatan infrastruktur digital, pemutakhiran data aset, serta koordinasi teknis lintas OPD. Komitmen pimpinan daerah turut memperkuat keberlanjutan kualitas pelaporan.

Kata kunci: Strategi, Laporan Keuangan Daerah, BKAD, Opini WTP, Manajemen Strategi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Christia & Ispriyarso (dalam Bahasoan dkk., 2024) menyampaikan bahwa tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan daerah. Namun, selain meningkatkan partisipasi masyarakat, otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Muhlisin dkk. (2025) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara maju seperti Australia. Penelitian oleh Haslam McKenzie dan Eyles (2024) mencatat bahwa “pemerintahan daerah di Australia memiliki kekuatan fiskal yang lemah karena kekuasaan fiskal terkonsentrasi di tingkat federal dan negara bagian,” sehingga membatasi kemampuan daerah dalam membangun kapasitas keuangan dan mengelola risiko secara mandiri. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen strategis guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Lebih dari itu, keberhasilan layanan juga tergantung pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan keadilan. Studi di sektor kesehatan Mesir menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut saling terkait dan berdampak signifikan terhadap kualitas tata kelola (Zeini dan Okasha, 2025).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelola oleh daerah. LKPD ini dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diberikan opini, salah satunya adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai predikat tertinggi dalam pelaporan keuangan daerah. Pencapaian opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, efektif dalam sistem pengendalian intern, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Minahasa Selatan berhasil mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut sejak laporan keuangan tahun anggaran 2016 hingga 2023. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Strategi tersebut mencakup formulasi visi dan misi daerah, identifikasi isu strategis, penyusunan rencana kegiatan, optimalisasi sistem informasi keuangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam aspek tertib administrasi aset, kompetensi teknis SDM, serta dinamika regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis strategi BKAD dalam menyusun LKPD Kabupaten Minahasa Selatan dalam mempertahankan opini WTP dari BPK. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pemerintahan daerah yang efektif, akan melahirkan prakarsa-prakarsa untuk perbaikan administrasi pemerintahan yang pada gilirannya memperkuat pembangunan ekonomi daerah (Azikin, 2018).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian terdahulu sebagian besar berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, seperti penerapan SAP, kompetensi SDM, atau efektivitas tindak lanjut hasil audit, dengan pendekatan kuantitatif atau studi deskriptif umum. Belum banyak kajian yang secara khusus mengeksplorasi strategi lembaga teknis seperti BKAD dalam menyusun laporan keuangan daerah secara mendalam, terutama dalam konteks mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Selain itu, penelitian sebelumnya belum mengaitkan strategi penyusunan laporan keuangan dengan kerangka manajemen strategis yang sistematis. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori Manajemen Strategi Novianto (2019) sebagai pisau analisis, guna memahami secara komprehensif bagaimana strategi BKAD Kabupaten Minahasa Selatan dijalankan dalam praktik untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan daerah..

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada sejumlah studi terdahulu guna memperkuat relevansi topik dan menunjukkan kebaruan pendekatan yang digunakan. Penelitian oleh Moroki dan Warbung (2023) yang dilakukan di Kantor BPKPD Kota Tomohon menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif, meskipun tidak signifikan, terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Berbeda dari itu, Ramdani (2023) dalam penelitiannya mengenai strategi Pemerintah Kota Bogor dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan, menggunakan pendekatan mix methods dengan analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan, khususnya pada jabatan eselon II, menjadi strategi prioritas untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Rufaedah (2021), yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat, menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dan menunjukkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi audit BPK merupakan faktor penghambat paling signifikan terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di samping itu, kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPIP) dan ketidakpatuhan terhadap regulasi juga ditemukan, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Sementara itu, Reynata Putri Purwaningtyas (2023) meneliti strategi Pemerintah Kota Salatiga dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan berbasis aktual. Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa mutasi jabatan serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, khususnya aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi

Persediaan), menjadi penghambat utama. Tambahan penting juga datang dari penelitian Naida dan Sartika (2024), yang menganalisis tantangan dan strategi dalam penyusunan laporan keuangan berkualitas melalui penerapan SIPD di Kabupaten Tojo Una-Una. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kerangka analisis SWOT, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, masih terdapat kendala signifikan berupa rendahnya kompetensi SDM, minimnya pelatihan teknis, dan ketimpangan infrastruktur teknologi antar-OPD. Penelitian ini juga menekankan perlunya pelatihan intensif dan penguatan teknologi informasi untuk mendukung keberhasilan implementasi SIPD secara menyeluruh. Seluruh penelitian tersebut menjadi referensi penting bagi penulis dalam melihat pola pengelolaan keuangan daerah serta strategi yang digunakan untuk menyusun dan mempertahankan kualitas laporan keuangan. Namun demikian, penelitian ini memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari studi sebelumnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan studi-studi terdahulu karena secara khusus mengkaji strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun laporan keuangan daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tidak seperti penelitian Moroki dan Warbung (2023) yang fokus pada pengaruh SAP dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan melalui pendekatan kuantitatif, atau studi Rufaedah (2021) yang menekankan hambatan pencapaian opini WTP di Bandung Barat secara statistik, penelitian ini menggali aspek strategis organisasi secara mendalam. Berbeda pula dengan penelitian Ramdani (2023) yang menekankan strategi pada level kota secara makro menggunakan SWOT-QSPM, serta penelitian Purwaningtyas (2023) yang memusatkan perhatian pada isu mutasi pegawai dan teknologi informasi di Kota Salatiga, penelitian ini menggunakan kerangka teori Manajemen Strategi Novianto (2019) sebagai alat analisis utama. Kerangka ini memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap proses formulasi, implementasi, hingga evaluasi strategi dalam konteks penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual. Keunikan penelitian ini juga terletak pada objeknya yang terfokus secara spesifik pada satu perangkat daerah teknis, yakni BKAD Kabupaten Minahasa Selatan, dan bagaimana unit ini merespons berbagai tantangan teknis dan struktural dalam siklus pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya kajian mengenai strategi kelembagaan dalam pengelolaan keuangan publik serta menawarkan perspektif baru terhadap praktik penyusunan laporan keuangan daerah di tingkat kabupaten.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi Badan Keuangan dan Aset Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumentasi. Menurut Sugiyono (dalam Ardiansyah dkk., 2023), pendekatan kualitatif didasarkan pada paradigma postpositivisme, yang digunakan untuk memahami objek penelitian secara alami dan kontekstual, berbeda dengan metode eksperimen yang lebih

terkendali. Simangunsong (2016), menyatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat lentur dan terbuka, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan rancangan penelitiannya sesuai dengan dinamika yang muncul di lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Nasution (dalam Hikmawanti, 2020), dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama, yang kemudian diperkuat dengan alat bantu seperti pedoman wawancara dan catatan dokumenter. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam dari para informan. Dalam hal ini, peneliti menerapkan wawancara semistruktur, yaitu jenis wawancara yang bersifat terbuka namun tetap berlandaskan pada garis besar pertanyaan. Moleong (Suwartono, 2014) menyebut jenis ini sebagai wawancara dengan panduan umum, yang memungkinkan dialog berlangsung secara fleksibel dan menggali isu yang lebih luas. Informan dalam penelitian ini mencakup para pejabat dan pegawai teknis di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan, yakni Kepala BKAD, para Kepala Bidang seperti Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Aset, serta beberapa pegawai teknis yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Proses analisis data dilakukan dengan merujuk pada teori Manajemen Strategi dari Novianto (2019), yang mencakup 8 (delapan) tahapan dalam proses manajemen strategi. Selain itu, peneliti juga menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman (dalam Simangunsong, 2016). Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai strategi yang diterapkan BKAD dalam menyusun laporan keuangan guna mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi Misi dan Sasaran Organisasi

Tabel 1. Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2013-2023

Tahun	OPINI BPK			
	WTP	WDP	TW	TMP
2013	-	-	✓	-
2014	-	✓	-	-
2015	-	✓	-	-
2016	✓	-	-	-
2017	✓	-	-	-
2018	✓	-	-	-
2019	✓	-	-	-
2020	✓	-	-	-
2021	✓	-	-	-
2022	✓	-	-	-
2023	✓	-	-	-

Sumber : <https://sulut.bpk.go.id/> (2023) (Data diolah oleh Penulis, 2025)

Penulis menggunakan salah satu indikator utama dalam penelitian ini, yakni capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai representasi keberhasilan strategi

penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Opini WTP menjadi target strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pertama kali memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017 untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016. Sebelumnya, Pemkab Minahasa Selatan menerima opini WDP secara berturut-turut pada 2014 dan 2015, serta opini Tidak Wajar dan bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada periode sebelumnya. Sejak saat itu, capaian opini WTP berhasil dipertahankan selama delapan tahun berturut-turut hingga tahun 2024, yang mencerminkan konsistensi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelaporan keuangan.

Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah juga ditunjukkan melalui implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sejak tahun 2014, sejalan dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010. Langkah ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang menjadi fondasi dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar pemeriksaan BPK.

Hasil wawancara dengan Kepala BKAD Kabupaten Minahasa Selatan, Drs. James J. Tombokan, pada 20 Januari 2025, memperkuat data penelitian ini. Beliau menyampaikan:

“Jadi tujuan *deng* (dan) target BKAD untuk sekarang itu ada dua. Kalau lia (lihat) di Indikator Kinerja Utama, target BKAD itu adalah peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) serta *mo dapa* (mendapatkan) opini WTP terhadap hasil pemeriksaan LKPD dari BPK. Bisa dibilang selama beberapa tahun terakhir, BKAD sudah berhasil capai target. Sudah 8 tahun berturut-turut, Pemkab. Minahasa Selatan berhasil *dapa* (mendapatkan) opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK terkait pemeriksaan laporan keuangan daerah. Saya selaku Kaban (Kepala Badan) disini serta rekan-rekan kerja yang lain berharap semoga hal positif ini terus berlanjut.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa opini WTP bukan hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga merupakan bagian dari indikator kinerja utama organisasi, yang menjadi fokus pencapaian strategis BKAD.

Penulis menyimpulkan bahwa strategi dan langkah-langkah sistematis yang diterapkan BKAD dalam menyusun laporan keuangan telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan daerah. Capaian opini WTP yang berkelanjutan menjadi indikator keberhasilan utama yang dapat dijadikan contoh bagi daerah lain.

3.2. Analisa Lingkungan Eksternal

Penulis mengidentifikasi bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang kompleks. Faktor-faktor eksternal ini turut membentuk arah kebijakan, strategi, serta kinerja penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Beberapa faktor utama yang teridentifikasi meliputi regulasi pusat, kondisi sosial-politik lokal, kinerja OPD lain, peran DPRD, dan situasi darurat.

Salah satu faktor eksternal paling dominan adalah kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat, termasuk penerapan SAP berbasis akrual dan penggunaan aplikasi SIPD. Perubahan regulasi tersebut menuntut adaptasi cepat dari BKAD, baik dalam hal sistem pencatatan maupun peningkatan kapasitas SDM. Penyesuaian terhadap aturan terbaru, seperti Permendagri No. 47 Tahun 2021, juga memperketat proses pelaporan aset, sehingga meningkatkan tuntutan akurasi dalam pelaporan.

Selain itu, faktor sosial-politik di tingkat lokal juga memiliki pengaruh yang tidak dapat diabaikan. Ketidaksepakatan antara eksekutif dan legislatif, atau mutasi pejabat secara politis, dapat berdampak pada ketidakstabilan pelaksanaan anggaran. Meski demikian, BKAD menunjukkan stabilitas organisasi, tercermin dari tidak adanya pergantian Kepala BKAD sejak tahun 2021. Keberlanjutan ini mendukung konsistensi pelaporan keuangan.

Kinerja dan disiplin organisasi perangkat daerah (OPD) lain juga menjadi penentu keberhasilan BKAD. Laporan realisasi anggaran, aset, dan dokumen pendukung lainnya sangat bergantung pada ketepatan waktu dan akurasi data dari setiap OPD. Ketidaksesuaian atau keterlambatan penyampaian data berisiko menghambat proses konsolidasi, bahkan dapat menimbulkan temuan dalam audit BPK.

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Minahasa Selatan memainkan peran sentral dalam mengarahkan, mengawasi, dan menyempurnakan pelaporan keuangan daerah. Kepala Bidang Anggaran BKAD, Bapak Jhon F. Wungow, S.E., MSA., menyatakan:

“...DPRD bukan cuma lembaga pengawas, tapi juga mitra kerja kami. Pada proses penyusunan laporan keuangan, mereka memberikan masukan yang konstruktif terutama dalam evaluasi pelaksanaan anggaran... Biasanya torang laksanakan rapat kerja dengan Komisi III sebelum dan sesudah penyusunan LKPD. DPRD memberikan catatan yang sangat membantu dalam membenahan pengelolaan aset dan akuntabilitas anggaran.”

Koordinasi antara BKAD dan DPRD diperlukan untuk menjembatani perbedaan antara kebutuhan fiskal daerah dan aspirasi politik masyarakat. Sinkronisasi yang efektif mendorong terciptanya laporan keuangan yang akuntabel dan representatif. Tidak kalah penting, kondisi darurat seperti pandemi atau bencana alam juga turut memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Refocusing anggaran, perubahan pola kerja, dan peningkatan intensitas pengawasan menjadikan tugas BKAD semakin kompleks. Dalam situasi ini, kemampuan adaptif serta ketepatan pelaporan menjadi sangat krusial.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, penulis menyimpulkan bahwa strategi penyusunan laporan keuangan oleh BKAD tidak hanya ditentukan oleh aspek internal, tetapi juga sangat bergantung pada pengaruh dan dukungan dari faktor-faktor eksternal yang dinamis. Kombinasi antara kepatuhan terhadap regulasi, koordinasi lintas lembaga, dan stabilitas organisasi menjadi fondasi utama keberhasilan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

3.3. Identifikasi Peluang dan Ancaman

Penulis mengidentifikasi bahwa dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan menghadapi berbagai peluang dan ancaman yang memengaruhi kinerja dan efektivitas pelaporan. Analisis terhadap kondisi eksternal ini menjadi penting sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan strategi peningkatan kualitas laporan keuangan.

Dari sisi peluang, regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat memberikan arah yang semakin jelas dan terperinci dalam tata kelola keuangan daerah. Adanya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 memberikan pedoman yang konkret bagi pemerintah daerah, termasuk BKAD, dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini menjadi landasan normatif yang mendukung terciptanya standar pelaporan yang seragam dan berkualitas.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan. Sistem aplikasi seperti SIPD dari Kementerian Dalam Negeri, SIMDA dari BPKP, serta berbagai sistem pendukung lainnya telah diimplementasikan untuk membantu pencatatan dan pelaporan keuangan secara digital. Pemanfaatan sistem ini mendorong konsistensi data antar-OPD serta mempercepat proses konsolidasi laporan di tingkat BKAD.

Selain itu, peluang peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) turut memperkuat kapasitas kelembagaan BKAD. Pelatihan teknis, bimbingan, dan pendampingan dari instansi seperti Kemendagri dan BPKP menjadi faktor penting dalam mendukung pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan serta penggunaan aplikasi keuangan. Inisiatif ini bukan hanya meningkatkan profesionalisme aparatur, tetapi juga mendorong terwujudnya laporan keuangan daerah yang lebih akurat dan tepat waktu.

Namun demikian, terdapat sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah keterlambatan pengumpulan data dari OPD/SKPD yang dapat menghambat proses konsolidasi laporan keuangan. Ketepatan waktu penyampaian data dari OPD merupakan prasyarat utama dalam menjaga kelancaran proses penyusunan laporan oleh BKAD. Keterlambatan sekecil apapun dapat berdampak signifikan terhadap jadwal pelaporan keuangan secara keseluruhan.

Ancaman lainnya adalah tingginya ketergantungan terhadap sistem informasi. Walaupun sistem seperti SIPD dan SIMDA memberikan manfaat besar, gangguan teknis seperti pemeliharaan sistem (maintenance) atau ketidaksempurnaan fitur dapat mengganggu proses pelaporan. Ketergantungan penuh pada sistem digital menjadikan setiap gangguan sebagai hambatan serius yang memerlukan kesiapan antisipatif dari BKAD.

Di samping itu, kualitas SDM keuangan di masing-masing OPD/SKPD belum merata. Masih terdapat aparatur yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan atau belum mahir menggunakan sistem aplikasi keuangan. Hal ini menyebabkan data yang dikirim ke BKAD sering kali tidak akurat atau tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan dalam standar akuntansi pemerintah, sehingga menambah beban kerja koreksi manual dan memperbesar risiko kesalahan dalam laporan keuangan.

Dengan demikian, meskipun BKAD memiliki berbagai peluang strategis yang dapat dioptimalkan untuk menyusun laporan keuangan secara efektif, tantangan berupa kendala teknis dan keterbatasan sumber daya tetap menjadi perhatian utama. Penanganan terhadap ancaman-ancaman tersebut menjadi bagian penting dalam strategi penguatan kelembagaan BKAD ke depan.

3.4. Analisa Lingkungan Internal/ Sumber Daya Organisasi

Dalam upaya mewujudkan laporan keuangan daerah yang akurat, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), peran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan sangat krusial. Selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, keberhasilan BKAD juga ditentukan oleh sejumlah faktor internal yang melekat dalam operasional organisasi. Penulis mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan secara internal, yaitu kompetensi SDM, koordinasi antarbidang, sistem kerja, serta sarana dan prasarana pendukung.

Faktor pertama yang paling mendasar adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan, seperti operator SIPD dan SIMDA, staf bidang akuntansi, serta pengelola keuangan OPD, dituntut memiliki pemahaman teknis yang kuat terkait regulasi dan sistem pelaporan berbasis akrual. Kepala BKAD Kabupaten Minahasa Selatan, Drs. James J. Tombokan, menyampaikan:

“Kalau *torang* (kita) bicara soal faktor internal, ada beberapa hal penting yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan di BKAD. Pertama, tentu saja kompetensi SDM ya... sistem yang terus berkembang seperti SIPD dan SIMDA menuntut pegawai BKAD untuk terus belajar dan beradaptasi.”

Untuk menjaga kompetensi tersebut, BKAD secara rutin mengadakan pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), coaching clinic dari BPKP, serta sosialisasi aplikasi pelaporan keuangan. Namun, tantangan tetap muncul terutama pada akhir tahun anggaran, saat beban kerja meningkat tajam karena kebutuhan rekapitulasi dan pelaporan keuangan dari seluruh OPD.

Faktor kedua adalah koordinasi internal antarbidang di dalam BKAD, yang menjadi kunci keberhasilan dalam menyusun laporan yang lintas fungsi. Kepala BKAD menjelaskan bahwa penyusunan laporan tidak dapat dikerjakan secara terpisah, melainkan membutuhkan sinergi antara Bidang Akuntansi, Anggaran, Perbendaharaan, dan Aset. Beliau menekankan:

“Penyusunan laporan keuangan nda cuma dikerjakan oleh satu orang atau satu bidang saja. Perlu ada kerja sama yang baik antara bidang akuntansi, perbendaharaan, anggaran, dan aset supaya penyusunan laporan keuangan lancar dan minim revisi.”

Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini tidak selalu berjalan mulus. Hambatan seperti keterlambatan data dari bidang tertentu, perbedaan pemahaman terhadap aturan baru, dan ketidaksinkronan waktu kerja sering kali menjadi kendala. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan rapat koordinasi rutin dan komunikasi aktif antarbidang, terutama menjelang penyusunan laporan akhir tahun.

Faktor ketiga adalah sistem dan prosedur kerja. BKAD telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas. Namun, implementasinya masih belum konsisten. Kepala BKAD mengakui bahwa:

“Torang *so* (sudah) ada SOP, tapi kadang implementasinya belum maksimal. Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar pekerjaan bisa lebih efisien.”

Beberapa kendala yang muncul antara lain ketidakterpenuhinya jadwal pelaporan internal, tumpang tindih tanggung jawab akibat sistem kerja yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta kurangnya evaluasi rutin terhadap efektivitas SOP yang berlaku. Untuk itu,

penegakan kedisiplinan prosedur dan peningkatan pemanfaatan sistem digital menjadi hal yang harus diperkuat.

Faktor keempat adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Sarana kerja seperti perangkat komputer, jaringan internet, server, ruang arsip, dan perangkat lunak seperti SIPD dan SIMDA menjadi tulang punggung dalam mendukung proses pelaporan. Kepala Bidang Aset BKAD, Ibu Ischaal Bangki, S.E., M.M., menyatakan:

“Sarana dan prasarana itu *torang pe* tulang punggung (tulang punggung kita) operasional... Torang punya ruang server khusus untuk tempat penyimpanan data keuangan, serta jaringan LAN dan Wi-Fi agar akses ke sistem informasi seperti SIPD dapat dilakukan.”

Meski demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti perangkat keras dengan spesifikasi rendah dan jaringan internet yang tidak stabil di beberapa titik, yang dapat menghambat proses input data ke dalam sistem daring. Fasilitas arsip dan ruang koordinasi yang tersedia sudah cukup mendukung, namun diperlukan pembaruan berkala terhadap infrastruktur teknologi agar proses kerja semakin optimal.

Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan BKAD dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi eksternal, tetapi juga ditentukan oleh kekuatan internal organisasi. Peningkatan kompetensi SDM, penguatan koordinasi internal, optimalisasi sistem kerja, serta modernisasi sarana dan prasarana merupakan pilar penting yang mendukung kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

3.5. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Penulis mengidentifikasi bahwa dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan memiliki sejumlah kekuatan yang menjadi fondasi keberhasilan penyusunan laporan keuangan daerah. Komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan menjadi pendorong utama. Sinergi antara BKAD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya turut memperlancar koordinasi lintas sektor, yang sangat penting dalam proses konsolidasi data dan penyusunan laporan keuangan yang komprehensif.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten oleh BKAD juga menjadi indikator kedisiplinan teknis yang mendukung perolehan opini WTP dari BPK. Selain itu, kemampuan BKAD dalam mengelola sistem informasi keuangan secara terintegrasi, melalui pemanfaatan aplikasi seperti SIPD dan SIMDA, mempercepat alur kerja pelaporan sekaligus meningkatkan keakuratan dan validitas data. Tidak kalah penting, BKAD juga menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yang memungkinkan dilakukannya perbaikan berkelanjutan terhadap kelemahan-kelemahan sebelumnya dalam sistem pelaporan dan pengendalian internal.

Meski demikian, sejumlah kelemahan internal masih menjadi tantangan dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan. Salah satu kendala yang sering muncul adalah penyusunan anggaran pendapatan yang belum sepenuhnya realistis. Perencanaan yang tidak akurat menyebabkan realisasi pendapatan daerah kerap meleset dari target, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kestabilan fiskal dan keandalan pelaporan keuangan.

Selain itu, pengelolaan aset tetap masih menghadapi permasalahan administratif, seperti belum lengkapnya bukti kepemilikan serta belum tertibnya pencatatan dan pemanfaatan aset daerah. Kelemahan ini berpotensi menimbulkan temuan dalam audit BPK, terutama terkait dengan ketidaksesuaian nilai aset dalam laporan.

Keterbatasan pengawasan dan koordinasi internal di lingkungan OPD juga menjadi faktor yang menghambat kelancaran penyusunan laporan. Ketidaksiuaian data, keterlambatan pelaporan, dan lemahnya disiplin dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tantangan yang harus segera ditangani. Masalah ini diperparah dengan masih kurang optimalnya pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan belanja modal, di mana ditemukan beberapa kasus keterlambatan pekerjaan atau kekurangan volume tanpa dikenakan sanksi yang tegas.

Terakhir, kapasitas sumber daya manusia di tingkat BKAD dan OPD masih memerlukan penguatan. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan serta rendahnya keterampilan teknis dalam penggunaan aplikasi pelaporan dapat berdampak langsung pada kesalahan pencatatan dan lemahnya pengendalian internal.

Secara keseluruhan, kekuatan BKAD dalam hal komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi, pemanfaatan teknologi, dan tindak lanjut hasil audit menjadi pilar penting dalam menjaga opini WTP. Namun, untuk menjamin keberlanjutan kualitas pelaporan keuangan daerah, diperlukan perbaikan sistemik pada aspek perencanaan anggaran, manajemen aset, pengawasan internal, pelaksanaan kegiatan, serta pengembangan kapasitas aparatur keuangan daerah.

3.6. Merumuskan Strategi

Penulis mengidentifikasi bahwa perumusan strategi penyusunan laporan keuangan daerah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini dirancang agar sejalan dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun. Dalam konteks ini, BKAD memegang peran sentral sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel dan transparan, dengan target utama mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Langkah awal dalam proses perumusan strategi dimulai dengan penelaahan terhadap visi, misi, dan program kerja kepala daerah. BKAD memastikan bahwa strategi yang dirancang selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah, sehingga mendukung tercapainya sasaran makro pembangunan daerah secara menyeluruh.

Selanjutnya, BKAD melakukan analisis terhadap dokumen perencanaan dan kebijakan terkait, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Dokumen seperti RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, hingga kebijakan dari kementerian/lembaga relevan dianalisis untuk memastikan integrasi dan sinkronisasi antara program kerja BKAD dengan kerangka pembangunan yang lebih luas.

Langkah berikutnya adalah identifikasi isu strategis dan permasalahan aktual yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Isu-isu seperti perubahan regulasi,

keterbatasan SDM, pengelolaan sistem informasi keuangan, serta tantangan koordinasi lintas-OPD dianalisis sebagai dasar perumusan strategi. Dalam hal ini, BKAD tidak hanya menilai faktor internal, tetapi juga mempertimbangkan dinamika eksternal yang dapat memengaruhi efektivitas pelaporan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, BKAD kemudian melakukan formulasi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan ini antara lain mencakup peningkatan kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), peningkatan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), serta keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP dari BPK.

Setelah itu, BKAD menyusun strategi dan arah kebijakan operasional yang lebih teknis. Strategi tersebut meliputi penguatan sistem pengendalian internal, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan seperti SIPD dan SIMDA, serta penguatan koordinasi dengan OPD melalui mekanisme sinergi lintas sektor.

Langkah strategis ini diterjemahkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan operasional yang terukur dan sesuai dengan pagu anggaran, indikator kinerja, serta kelompok sasaran. Penyusunan kegiatan ini tetap merujuk pada prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

Sebagai bagian dari siklus strategis, BKAD juga melaksanakan evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala. Evaluasi ini mencakup pemantauan terhadap pencapaian target, penanganan temuan audit dari BPK, serta tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Hasil evaluasi menjadi dasar penyesuaian strategi agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan kelembagaan.

Terakhir, perumusan strategi ini melibatkan stakeholder terkait dan menuntut komitmen dari pimpinan daerah. Keterlibatan OPD, aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), serta pejabat teknis lainnya sangat penting dalam menjamin konsistensi pelaksanaan strategi. Salah satu bentuk konkret dari komitmen ini adalah penandatanganan kesepakatan penyelesaian laporan keuangan antar-OPD, yang menjadi simbol tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas dan ketepatan pelaporan keuangan daerah.

Dengan demikian, strategi yang dirumuskan oleh BKAD Kabupaten Minahasa Selatan merupakan hasil dari proses yang sistematis, terstruktur, dan partisipatif, serta diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas fiskal dan mempertahankan capaian opini WTP secara berkelanjutan.

3.7. Evaluasi Strategi

Penulis menemukan bahwa evaluasi strategi yang dijalankan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyusunan laporan keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur capaian strategi yang telah diimplementasikan serta mengambil tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian antara hasil yang diperoleh dan target yang telah ditetapkan.

BKAD menerapkan strategi pengelolaan keuangan berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam proses pengukuran kinerja, terdapat beberapa indikator utama yang digunakan untuk menilai kualitas dan ketepatan laporan keuangan. Pertama, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) menjadi tolok ukur utama atas efektivitas penyusunan laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah berhasil mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut, yang menunjukkan bahwa strategi pelaporan keuangan yang dijalankan oleh BKAD berjalan secara konsisten dan sesuai standar.

Selain itu, penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) juga digunakan sebagai indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun anggaran 2023, Kabupaten Minahasa Selatan memperoleh nilai IPKD sebesar 80,218 dan berada pada peringkat ke-37 dari 195 daerah dengan kategori kemampuan keuangan rendah. Meskipun penilaian menunjukkan perlunya perbaikan, capaian indeks tersebut telah melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama BKAD, yaitu 59,0. Namun demikian, masih terdapat dua aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran serta tingkat penyerapan anggaran. Realisasi anggaran tahun 2023 juga menjadi indikator penting dalam evaluasi strategi. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp 242,5 miliar, realisasi anggaran mencapai Rp 237,2 miliar atau sebesar 97,79 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program kerja BKAD relatif efektif.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja tersebut, BKAD Kabupaten Minahasa Selatan mengambil berbagai langkah korektif untuk menyempurnakan proses penyusunan laporan keuangan. Salah satu fokus utama adalah pada perbaikan sistem informasi keuangan, seperti SIPD dan SIMDA, yang menjadi platform pelaporan resmi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat kendala teknis, seperti keterbatasan fitur integrasi data antar-OPD, kesalahan input transaksi, serta belum optimalnya pemahaman SDM terhadap sistem. Untuk menjawab tantangan ini, BKAD melakukan sejumlah langkah korektif seperti pembaruan data sistem secara berkala, peningkatan pelatihan teknis kepada operator dan bendahara OPD/SKPD, serta membentuk tim teknis pengelola SIPD yang bertugas memantau, memperbaiki sistem, dan menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat.

Langkah korektif lainnya dilakukan dalam bentuk penataan dan validasi ulang data keuangan yang bersumber dari setiap OPD/SKPD. BKAD melakukan verifikasi menyeluruh terhadap saldo kas, aset tetap, belanja daerah, serta piutang dan utang untuk memastikan ketepatan pelaporan. Disiplin pelaporan internal juga diperkuat agar setiap unit kerja menyampaikan data keuangan secara berkala dan akurat sebagai dasar penyusunan laporan kabupaten.

Lebih lanjut, BKAD memberikan perhatian serius terhadap tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil audit BPK. Evaluasi ini tidak dianggap sebagai formalitas semata, melainkan sebagai dasar perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Kepala Bidang Akuntansi BKAD, Bapak Ronald Ferdinandus, S.E., menyatakan:

“BPK punya kegiatan rutin yang melibatkan seluruh kepala daerah se-Indonesia... *Torang nimau* (kami tidak mau) Kabupaten Minahasa Selatan masuk dalam peringkat bawah. Maka dari itu, setiap OPD atau SKPD kita tekankan untuk segera menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan karena kan waktu yang dapa kase maksimal 60 hari.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BKAD tidak hanya sekadar menanggapi hasil audit secara administratif, tetapi juga menjadikan rekomendasi BPK sebagai indikator akuntabilitas dan integritas institusi.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, BKAD menyusun jadwal kerja internal untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara sistematis. Surat resmi disampaikan kepada OPD terkait, dilengkapi dengan pendampingan teknis dan koordinasi melalui rapat kerja untuk menyelesaikan temuan secara tepat waktu. Selain itu, publikasi peringkat tindak lanjut temuan oleh BPK juga dimanfaatkan sebagai motivasi kinerja, sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terdorong untuk mempertahankan posisi atas dalam penilaian tersebut. Dengan sistem evaluasi berkelanjutan dan pendekatan korektif yang menyeluruh, BKAD menunjukkan peran yang tidak hanya reaktif terhadap audit, tetapi juga proaktif dalam memperkuat kualitas dan integritas laporan keuangan daerah secara berkelanjutan.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, strategi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah oleh BPKAD Kabupaten Barito Selatan menunjukkan adanya tantangan internal dan eksternal yang serupa dengan temuan beberapa studi sebelumnya. Penelitian oleh Moroki dan Warbung (2023) di BPKPD Kota Tomohon misalnya, mengungkap bahwa kompetensi SDM dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, meskipun belum signifikan. Temuan tersebut senada dengan kondisi di Barito Selatan, di mana keterbatasan kompetensi teknis masih menjadi kendala dalam optimalisasi sistem digital. Namun, penelitian ini lebih menekankan bahwa kualitas pelaporan tidak hanya ditentukan oleh SDM dan SAP, tetapi juga oleh stabilitas infrastruktur teknologi dan keberlanjutan pelatihan.

Penelitian Ramdani (2023) yang mengkaji strategi Pemerintah Kota Bogor dengan pendekatan SWOT dan QSPM, menyatakan bahwa penguatan kepemimpinan eselon II menjadi kunci mempertahankan opini WTP. Hal ini sejalan dengan temuan di Barito Selatan, di mana dukungan pimpinan daerah dan kepala BPKAD menjadi faktor penggerak dalam menjaga konsistensi pelaporan keuangan yang akuntabel. Penelitian ini juga menambahkan bahwa koordinasi lintas-OPD serta pembinaan berkelanjutan merupakan strategi penting yang belum banyak dibahas secara mendalam di studi sebelumnya.

Rufaedah (2021) menyoroti bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan lemahnya pengendalian internal menjadi hambatan utama pencapaian opini WTP. Penelitian ini menguatkan temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa tantangan dalam penyusunan laporan keuangan di Barito Selatan bukan hanya berasal dari dalam BKAD, melainkan juga dari keterlambatan laporan OPD lain, percepatan audit BPK, dan tingginya mutasi pegawai yang memengaruhi stabilitas operasional.

Sementara itu, penelitian Reynata Putri Purwaningtyas (2023) yang meneliti Kota Salatiga menemukan bahwa aplikasi SIAP dan mutasi jabatan menjadi kendala serius dalam pelaporan. Temuan ini juga paralel dengan kondisi Barito Selatan, di mana aplikasi SIMDA dan SIPD masih mengalami kendala teknis dan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menyulitkan proses konsolidasi laporan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi baru dengan menekankan pentingnya sinergi antara penguatan kapasitas SDM, modernisasi sistem teknologi informasi, pengelolaan aset secara digital, serta dukungan regulasi dan politik yang konsisten. Tidak hanya menyusun strategi

jangka pendek dalam merespons hambatan, tetapi juga menyusun arah kebijakan yang selaras dengan RPJMD dan dinamika eksternal, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BPKAD Barito Selatan dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan daerah dapat menjadi model penerapan manajemen strategi sektor publik yang adaptif dan berkelanjutan.

3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa terdapat empat faktor utama yang menghambat efektivitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu keterlambatan laporan dari OPD, percepatan audit oleh BPK, keterbatasan kompetensi SDM, serta rotasi pegawai yang tinggi. Hambatan pertama muncul dari ketidakpatuhan sebagian OPD dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Keterlambatan ini menyulitkan proses konsolidasi dan validasi laporan yang dilakukan oleh BKAD. Hambatan kedua adalah percepatan jadwal audit BPK yang kadang lebih awal dari batas regulasi, sehingga mempersempit waktu penyusunan laporan dan menambah beban kerja tim pelaporan. Hambatan ketiga berkaitan dengan rendahnya kompetensi teknis SDM di OPD, khususnya dalam penggunaan aplikasi pelaporan keuangan seperti SIPD dan SIMDA. Banyak bendahara belum memiliki latar belakang akuntansi yang memadai. Hambatan keempat adalah tingginya frekuensi mutasi pegawai, yang mengganggu kontinuitas kerja dan menyebabkan proses adaptasi ulang yang memperlambat penyusunan laporan.

Sebagai respons terhadap berbagai hambatan tersebut, BKAD Kabupaten Minahasa Selatan menetapkan beberapa upaya strategis untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan meningkatkan kualitas LKPD di periode berikutnya. Fokus pertama adalah penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis lanjutan, pendampingan keuangan, dan pembinaan reguler ke OPD. Kedua, BKAD memperkuat integrasi dan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan aplikasi SIMDA dan SIPD, sekaligus meningkatkan infrastruktur digital untuk memastikan kecepatan dan akurasi pelaporan. Ketiga, penataan dan pemutakhiran aset tetap terus diintensifkan melalui digitalisasi data dan legalisasi dokumen kepemilikan. Keempat, koordinasi lintas-OPD ditingkatkan melalui rapat teknis dan asistensi penyusunan laporan sejak awal tahun anggaran. Kelima, tindak lanjut atas temuan BPK dilaksanakan secara konsisten melalui rencana aksi terukur dan pelibatan lintas unit kerja. Dukungan politik dari pimpinan daerah juga dijaga sebagai modal penting dalam menjaga integritas laporan keuangan.

Dengan berfokus pada penguatan kapasitas aparatur, stabilisasi koordinasi kelembagaan, inovasi digital, dan tata kelola aset yang tertib, BKAD optimis mampu menjawab tantangan yang ada dan terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Minahasa Selatan dalam memperoleh WTP tergolong baik. Hal itu dapat dilihat dari analisis melalui tahapan-tahapan manajemen strategi yang digunakan untuk menganalisisnya. Dalam identifikasi misi dan sasaran organisasi, BKAD Kabupaten

Minahasa Selatan menjadikan opini WTP sebagai target strategis utama dalam laporan keuangan, yang berhasil dipertahankan selama 8 (delapan) tahun berturut-turut sejak 2016. Analisa lingkungan eksternal mengungkapkan bahwa kinerja BKAD sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi pemerintah pusat, kondisi sosial-politik, kinerja OPD lain, peran DPRD, dan situasi darurat. Melihat dari segi peluang dan ancaman, peluang bagi BKAD meliputi regulasi jelas, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan SDM. Sementara ancaman utamanya adalah keterlambatan data, ketergantungan sistem, dan kualitas SDM OPD yang belum merata. Melalui identifikasi kekuatan dan kelemahan, kekuatan BKAD terletak pada komitmen organisasi, penerapan SAP, pemanfaatan teknologi, dan tindak lanjut rekomendasi BPK. Namun kelemahan masih ada pada perencanaan anggaran, pengelolaan aset, pengawasan internal, dan kapasitas SDM. Perumusan strategi BKAD melibatkan penyelarasan dengan RPJMD, analisis isu strategis, formulasi tujuan, penyusunan program, dan evaluasi berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan. Terakhir dari segi evaluasi, BKAD secara berkelanjutan mengevaluasi strategi berdasarkan capaian opini WTP dan IKPD, serta melakukan langkah korektif terhadap temuan dan rekomendasi BPK.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam upaya memperoleh data sebanyak-banyaknya dari lapangan penelitian, mengingat keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1st ed.). Deepublish.
- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP)*, 5(1), 35–41. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/446/271>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. (2023).
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Haslam McKenzie, F. M., & Eyles, S. (2024). Future-proofing a local government authority for a post-mining future. *Geographical Research*, 62(2), 293–308. <https://doi.org/10.1111/1745-5871.12634>
- Hikmawanti, F. (2020). *Metodologi Penelitian* (4th ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- Moroki, F. O., & Warbung, S. (2023). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor BPKPD Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(3), 630–641. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4769>
- Muhlisin, Subroto, W. T., & Sakti, N. C. (2025). How Impact Fiscal Decentralization to Sectoral Change and Local Inequality? *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(1), 379–389. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200134>
- Naida, N., & Sartika, D. (2024). Tantangan dan Strategi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berkualitas dengan SIPD: Studi Kualitatif di Kabupaten Tojo Una-Una. 19(2), 99–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.51277/keb.v19i2.208>
- Novianto, E. (2019). *Manajemen Strategis*. Deepublish.
- Purwaningtyas, R. P. (2023). *Upaya Pemerintah Daerah Kota Salatiga Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Berbasis Akrual*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ramdani, M. (2023). Strategi Pemerintah Kota Bogor dalam Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 7(2), 165–174. <https://doi.org/10.32487/jshp.v7i2.1666>
- Rufaedah, Y. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Kabupaten Bandung Barat. *Sigma-Mu*, 12(2), 44–64. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v12i2.2584>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi.
- Zeini, N. T., & Okasha, A. E. (2025). Good governance: an empirical evidence from Egypt's public health sector. *International Journal of Health Governance*, 30(1), 16–31. <https://doi.org/10.1108/IJHG-07-2024-0093>